

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit serta mampu meningkatkan kinerja baik dari segi finansial dan non finansial rumah sakit (Permenkes No 56 tahun 2014). Kinerja instansi kesehatan yang semakin meningkat selalu diharapkan oleh pasien sehingga keinginan dan kepuasan pasien serta misi rumah sakit dapat terpenuhi.

Kewajiban dari rumah sakit tidak bisa lepas dari kewajiban layanan komunikasi satu dengan yang lainnya, tetapi tidak bisa dihindari bahwasanya dalam proses rumah sakit masih sering terjadi masalah kepentingan dari berbagai golongan. Masalah kepentingan ini bersangkutan dengan klarifikasi kesatuan kelompok di rumah sakit, yaitu sebagai kesatuan kelompok usaha dan kesatuan kelompok non usaha (Priastuti, 2017). Perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal rumah sakit menyebabkan manajer rumah sakit harus mengubah paradigma atau cara pandang bahwa rumah sakit sekarang ini berkembang menjadi suatu industri jasa yang tidak bisa meninggalkan aspek komersial disamping peran sosialnya.

Rumah Sakit lebih sesuai untuk dijelaskan sebagai kesatuan kelompok non usaha, tidak melihat pada manfaat. Tetapi, sesuatu yang dituntut dari lingkungan seperti yang dituntut untuk berikan suatu layanan kesehatan yang baik, uang yang dikeluarkan untuk memberikan suatu layanan kesehatan yang tercapai, tenaga ahli yang professional dan perbekalan dengan teknologi yang modern menjadi tekad sekaligus masalah yang susah dihadapi bagi Rumah Sakit pemerintah (Tinarbuka, 2011). Di sisi lain, konflik lain yang timbul yakni konflik dalam batasnya perhitungan yang disediakan agar berjalannya peraturan di Rumah Sakit sehingga tidak dapat memajukan kualitas layanan, dan juga aturan tata aturan yang sangat panjang dalam pelaksanaan pencairan dana ataupun aturan prosesnya dalam keuangan yang dapat menahan lancarnya suatu pelayanan, kemudian susah untuk mengukur kinerja, selagi rumah sakit membutuhkan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar (Meidyawati, 2011).

Perubahan orientasi rumah sakit yang mulai dituntut untuk mencari keuntungan tanpa meninggalkan fungsi sosialnya memberikan suatu tatanan baru dalam pengelolaan rumah sakit secara lebih profesional seperti perusahaan modern. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat sehingga rumah sakit harus terus memperbaiki kinerjanya (Yulianti dkk, 2016). Evaluasi dan peningkatan kinerja rumah sakit membutuhkan suatu pengukuran kinerja yang komprehensif dan dapat mengikuti perkembangan pasar berdasarkan pertanggungjawaban secara finansial dan non finansial.

Rumah sakit merupakan instansi kesehatan yang dituntut mampu memberikan pertanggungjawaban secara finansial atau non finansial. Hal tersebut perlu suatu pengukuran kinerja yang tidak hanya memandang dari aspek finansial saja, namun juga aspek non finansialnya (Utama, 2013). Aspek finansial juga dapat digunakan untuk memberikan penilaian sebuah rumah sakit maju dan terus berkembang.

Pengukuran hasil kinerja baik keuangan maupun non-keuangan akan lebih mudah untuk diketahui apabila rumah sakit tersebut memiliki tujuan dan target yang jelas. Tujuan dan target inilah yang menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya pola pengelolaan rumah sakit tersebut. Semua yang dilakukan semata-mata untuk mewujudkan pola yang efektif dan efisien dalam pelayanan masyarakat, jadi apa yang telah diamanahkan tentu harus ditaati sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa'/4/ ayat 59 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. ...” (Q.S. An-Nisa': 59)

Meningkat perekonomian dengan menjalankan rumah sakit membutuhkan pengelolaan keuangan yang erat kaitannya dengan syariat islam, pelayanan kesehatan dengan syariah di anjurkan dalam islam guna mengendalikan supaya tetap berada dijalan yang benar sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang ada dalam syariat islam. Dengan kendali syariat, aktivitas diharapkan bisa mencapai empat hal utama yaitu target hasil, pertumbuhan (terus meningkat, keberlangsungan dan keberkahan atau keridhaan Allah. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam kinerja keuangan.

Penelitian terdahulu oleh Buluc et al (2017) menunjukkan bahwa beban rumah sakit sangat tinggi, rumah sakit telah mengalami masalah dalam membayar utang jangka pendek. Hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi rumah sakit untuk menggunakan sumber daya secara lebih efisien dan pengambilan keputusan dengan penuh pertimbangan pertimbangan terutama dalam hal finansial atau keuangan. Aspek finansial dipergunakan untuk melihat laporan keuangan di rumah sakit. Laporan keuangan rumah sakit menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha ada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, setiap rumah sakit mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan secara ekonomi baik penerapannya di Rumah Sakit Umum (RSU) maupun Rumah Sakit Syariah (RSS) yang berlandaskan tinjauan ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah (Suyatno, dkk, 2018).

Sejak difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 107/DSN-MU/IX/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, maka

penyelenggaraan rumah sakit Islam saat ini, sudah mulai mengubah warna pelayanannya. Fatwa tersebut mengatur bagaimana sebuah rumah sakit yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah harus dikelola khususnya Rumah Sakit Syariah atau Islam yaitu RS tipe C atau D. Salah satu rumah sakit yang menerima Sertifikat penetapan RS Syariah dari DSN MUI yaitu RSI Sultan Agung Islam yang telah memenuhi 51 persyaratan standar serta 173 elemen penilaian dari MUI (Sujianto, 2017). Misalnya, terkait dengan keuangan di RS syariah ini juga harus ada akad syariah, seperti ijarah, mudharabah, serta murabahah sesuai sistem pelayanan yang berjenjang.

Berlakunya sistem pelayanan berjenjang mengharuskan pasien dirujuk ke RS tipe C atau D terlebih dahulu sebelum ke tipe B. Salah satu rumah sakit tipe atau kelas B yang sedang berkembang dan banyak dikunjungi pasien khususnya di Yogyakarta yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Data jumlah pasien rawat jalan berdasarkan laporan tahunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Adanya peningkatan yang berkesinambungan maka perlu diketahui apakah ada keseimbangan dalam pengelolaan keuangan antara tingkat pendapatan dan pengeluaran, sehingga keuangan tersebut akan mampu untuk menjadi daya dukung dalam proses pelayanan yang baik dan lancar di rumah sakit. Penilaian yang dapat dicapai oleh rumah sakit yang susunan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 perihal suatu hal yang dikumpulkan dasar Penilaian

Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Penilaian kinerja Badan Layanan Umum (BLU) mencakupi jenis dalam keuangan dan penilaian jenis dalam pelayanan. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan mempelajari lebih dalam mengenai **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta)”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap kinerja keuangan (studi kasus di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta) sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan rasio keuangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016?
2. Apakah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sudah menerapkan Kinerja Keuangan sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah atau Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan rasio keuangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Keuangan di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan memberikan masukan dalam penyusunan teori dan konsep baru dalam penelitian. Selain itu juga dapat menjadi masukan yang berguna bagi peneliti, terutama yang berkaitan tinjauan ekonomi islam terhadap kinerja keuangan. Peneliti juga ingin menjadikan penelitian ini sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca terkait kinerja keuangan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi rumah sakit terkait dalam penentuan kebijakan ekonomi di rumah sakit dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan yang sudah ada